

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 8  
TAHUN 2000 TENTANG PEMBINAAN UMUM, KETERTIBAN,  
KEAMANAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEAPIKAN  
DALAM WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**GUSTI RAMANDA RAHMAN**

**NPM: 1221020053**

**Program Studi: Siyasah**

**Pembimbing I : Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H**

**Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

## **ABSTRAK**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17  
PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG PEMBINAAN UMUM, KETERTIBAN, KEAMANAN,  
KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEAPIKAN DALAM WILAYAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi pada Satpol PP Kota Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**Gusti Ramanda Rahman**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah produk politik yang berhasil dihasilkan oleh pemerintahan kota Bandar Lampung, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat bagaimana hasil dari peraturan tersebut untuk mengatur kemajemukan di dalamnya. Namun tidak semua peraturan yang telah ada dapat diterapkan langsung pemerintah ataupun diikuti oleh masyarakat. Seperti pada Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota Bandar Lampung, sudah lebih dari 15 tahun produk politik ini diregulasikan namun tidak berdampak banyak pada masyarakat dan perlu diketahui bahwa penegakan peraturan daerah kota Bandar Lampung menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Rumusan masalah pada penelitian ini mengarah kepada kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 8 Tahun 2000 dan bagaimana tinjauan hukum islamnya, Maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dan tinjauan Hukum Islam dalam implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Satpol PP.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deksriptif kualitatif, dalam pengumpulan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode interview sebagai metode pokok, kemudian metode observasi, dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Jenis Penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah Penelitian *Eksploratif*, dari sudut bentuknya adalah penelitian *Perspektif*, dan dari sudut tujuannya penelitian ini berjenis penelitian *fact finding*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Satuan Satpol PP belum maksimal dalam melaksanakan pasal 17 Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2000, sehingga masih banyak pelanggaran yang terkait pasal 17 di Kota Bandar Lampung.

**Kata kunci :** *Hukum Islam, Implementasi, Perda Kota Bandar Lampung, Satpolpp*





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Gusti Ramanda Rahman**

NPM : **1221020053**

Jurusan : **Siyasah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H**

**NIP. 197111061998032005**

**Eko Hidayat, S.Sos, M.H**

**NIP. 197512302003121002**

**Ketua Jurusan Siyasah**

**Drs. Susiadi AS, M.Sos.I**

**NIP.195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung**, di susun oleh **Gusti Ramanda Rahman, NPM. 1221020053** Jurusan Siyasah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juli 2018.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag**

**Penguji II : Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**M. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**



## MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَحَفُّظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا  
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ  
دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>1</sup>*




---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahan Azzahra. Qs. Ar-Ra'd: 11 (Bandung: Syamil Al-Qur'an)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ungkapan terimakasih, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda H. Rahman Imran dan Ibunda Hj. Maslena Sari tercinta, do'a tulus dan ucapan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, memberikan semangat, dukungan, dan tak pernah lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk kakak-kakakku Penny Valentina, Dwi Primayuni, dan Rama Malindo Rahman, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabatku, yang selalu menyemangati dan memberikan senyuman manis saat penat itu datang.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2012 yang senantiasa memberi keceriaan dan membantu dalam menempuh pendidikan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tempat ku menuntut ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Gusti Ramanda Rahman dilahirkan di Kotabumi Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 26 Oktober 1994, anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak H. Rahman Imran dan Ibu Hj. Maslena Sari.

Pendidikan yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar di SDN 4 Tanjung Aman, yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pada bangku SMPN 7 Kotabumi, yang diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian pada bangku menengah atas dilanjutkan di SMAN 4 Kotabumi, yang diselesaikan pada tahun 2012. Dan pada tahun 2012 diterima di IAIN Raden Intan Lampung jurusan Siyasah, semenjak 2017 berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama pernah menjadi anggota OSIS Juga mengikuti Organisasi Palang Merah Remaja (PMR). Dan pada jenjang perguruan tinggi pengalaman organisasi yang pernah dijadi penulis yaitu menjadi pengurus dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisyariat Syariah. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Suka Negeri Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) dalam bidang Siyasah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.  
Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag,.M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.



3. Drs. Susiadi AS, M.Sos.i, dan Frenki, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Siyasah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag,. M.H dan Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Mansi S.H dan seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Sahabat-sahabat ku almamater tahun 2012 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagai keluhan, keceriaan, serta saran-saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Siyasah.

Bandar Lampung, 27 Juni 2018

**Penulis,**

**Gusti Ramanda Rahman**  
**1221020053**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
 <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	 <b>17</b>
A. Kebijakan Pemerintah dalam Fiqh Siyasah.....	17
B. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah.....	30
C. Kebijakan Pemerintah Daerah Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	34
D. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung Ketertiban Umum .....	42
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	 <b>46</b>
A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	46
B. Gambaran Umum SATPOL PP Kota Bandar Lampung .....	49
C. Kewenangan SATPOL PP Dalam Menyelenggarakan Pasal 17 Perda Nomor 8 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung untuk Meningkatkan Ketertiban Umum.....	57
D. Penegakan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah	



Kota Bandar Lampung untuk Meningkatkan Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Satpol PP .....	60
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>64</b>
A. Implementasi Pasal 17 Perda Nomor 8 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum.....	64
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN





**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Kota Bandarlampung, berdasarkan Jenis kelamin.....	48
2. Nama-Nama Walikota Bandar Lampung dari tahun ke tahun.....	49
3. Kegiatan dan Penindakan Pelanggaran Perda .....	61



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Bagan Struktur (sumber Perwali Nomor 37 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung) .....	57





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penjelasan Judul**

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan**

Istilah ini menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki suatu masalah.<sup>1</sup>

#### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.<sup>2</sup>

#### **3. Implementasi**

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2

4. Pasal 17 Peraturan Daerah<sup>4</sup> Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung

Pasal 17 pada Perda Kota Banda Lampung Nomor 8 Tahun 2000 termasuk didalam BAB III LARANGAN, yang isinya mengatur tentang larangan membuat kegaduhan di tempat umum, larangan merusak fasilitas umum dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dari penjelasan judul diatas maka dapat disimpulkan maksud dari **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung”** adalah suatu penelitian secara ilmiah terhadap pelaksanaan pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, yang berisi larangan-larangan kepada masyarakat dan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaannya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja<sup>6</sup> Kota Bandar Lampung sebagaimana tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 352

<sup>4</sup> Kata Peraturan Daerah selanjutnya disingkat menjadi Perda

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000

<sup>6</sup> Kata Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat menjadi SATPOL PP



## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Alasan Subjektif

Penulis menilai masih banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat pada pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung<sup>7</sup>

### 2. Alasan Objektif

Fakta dilapangan membenarkan kondisi saat ini terkait pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung banyak tidak diketahui oleh masyarakat.<sup>8</sup>

## C. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil' alamin* yang artinya anugerah bagi seluruh makhluk di dunia, segala urusan telah diatur didalam kitab umat Islam yaitu Al Qur'an, tentang Tuhan, ibadah, dan sosial terdapat didalam Al Qur'an, termasuk permasalahan kali ini sudah diatur di dalam Al Qur'an surat An Nisa Ayat 59, Berikut dalil dan terjemahannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

<sup>7</sup> Sumber: Hasil Observasi bulan oktober, November 2017

<sup>8</sup> Mulyadiyansyah, wawancara dengan penulis, Graha Biru 47, Bandar Lampung, 10 November 2017

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya”.(An Nisa : 59)

Di dalam ayat tersebut terdapat pengulangan kata أَطِيعُوا yang menurut pengertiannya dari kata bahasa arab adalah taat, taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul dan Kepada Ulil Amri.

Dari berbagai pendapat bahwa Ulil Amri berarti pihak atau seseorang yang mendapatkan Hak untuk menjadi Pemimpin, seperti di Negara Indonesia yang kepemimpinan nya di wakili oleh Presiden yang dipilih dalam periode 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat. Dan di Provinsi dipimpin oleh Gubernur, di Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota yang sama sama dipilih oleh rakyatnya masing-masing, dan kita berkewajiban taat kepada pemimpin yang kita pilih.

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota, di periode 1995 sampai dengan 2005 Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Suharto sebagai Walikota dan Achmad Yulizar sebagai Wakil Wali Kota. Dan pada periode mereka Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung di terapkan.

Saat ini untuk membantu kepala daerah dalam penegakkan Perda menjadi tugas bagi SATPOL PP sebagaimana bunyi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah “Satuan polisi pamong



praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”<sup>9</sup> Dan untuk mengoptimalkan kinerja SATPOL PP dalam menyelenggarakan penegakkan Perda dan Perkada maka di bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Hal ini tentu menjadi wewenang khusus bagi SATPOL PP sebagai perangkat daerah dibidang penegakan hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.untuk segera melaksanakan dan menegakkan Perda yang telah diterapkan.

Banyak pelanggaran telah ditertibkan oleh petugas SATPOL PP Kota Bandar Lampung seperti pada saat dilakukan penelitian di Kantor SATPOL PP<sup>10</sup>, terdapat beberapa warga yang ditahan untuk dimintai keterangannya karena kedapatan di tempat-tempat umum pada saat razia jam malam, ada pula beberapa atribut iklan atau spanduk yang telah dicopot dan menurut keterangan anggota SATPOL PP spanduk tersebut melanggar perda.

Namun permasalahan yang terjadi dikota Bandar Lampung tidak hanya itu saja, sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum,Ketertiban,

---

<sup>9</sup>Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 ayat 1

<sup>10</sup> Pra Riset di Kantor Satpol PP pada tanggal 16 November 2017

Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang berbunyi<sup>11</sup>:

1. Memarkir kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih di jalan umum lebih dari 6 (enam) jam kecuali pada ruas jalan yang telah ditentukan untuk itu.
2. Mengendarai kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap tebal untuk gas yang bersifat membahayakan di jalan umum yang tingkat pencemarannya melebihi ketentuan, sehingga dapat membahayakan polusi dan gangguan.
3. Memasang tarub atau menutup jalan/trotoar untuk kepentingan pesta atau upacara lainnya yang bersifat pribadi tanpa seizin walikota.
4. Memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dipandang mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan pemakai jalan.
5. Merusak fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan dan papan nama jalan.
6. Memasang reklame/iklan pada trotoar dan persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas.
7. Merusak lingkungan taman dan hutan kota dengan membakar sampah, membuat api unggun, mencabut/menebang pohon penghijauan.
8. Merusak ornamen kota, lampu-lampu taman dan lampu jalan.

Jelas dalam pasal 17 Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan,

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, Pasal 17



Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung berisikan larangan kepada masyarakat.

Akan tetapi di Kota Bandar Lampung masih nampak terlihat pelanggaran terhadap pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung seperti:

1. Masyarakat menggunakan kendaraan yang mengeluarkan asap tebal dan gas ya gas yang membahayakan ditempat umum, penulis masih menemuinya di kendaraan bermotor jenis truk.
2. Memasang spanduk yang dipandang mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan pemakai jalan.
3. Memasang reklame/iklan pada trotoar dan persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas.
4. Merusak fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan dan papan nama jalan.

Sedangkan dalam pelaksanaan penegakkan Perda Kota Bandar Lampung telah ada yang bertanggung jawab.

Fakta ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa pokok penelitian ini. Adapun beberapa pokok penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana Implementasi pasal 17 Perda Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi pasal 17 Perda Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian agar pembaca dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini.

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni:

- a. Untuk mengetahui Implementasi pasal 17 Perda Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi pasal 17 Perda Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban,

Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

## 2. Kegunaan Penelitian

Didalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, adapun diantara lain manfaat penelitian yang dapat diberikan:

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan Efektifitas Penegakan Peraturan Daerah.
- 2) Sebagai pertimbangan dalam perbaikan program kerja di SATPOL PP dalam menegakkan Perda.

### b. Kegunaan Praktis

Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik bagi penerapan Perda.

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah tentu bagian yang tidak kalah penting adalah metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan hasil penelitian nantinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara keilmuan.

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Metode penelitian menurut Sugiono adalah: “cara ilmiah untuk mendapatkan data

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.



yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan dapat mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian adalah suatu alat bantu untuk mengukur kevalidan dan supaya dapat ditemukan dan dibuktikan kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>14</sup> Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.<sup>15</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

## 2. Sumber data



Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.<sup>16</sup>

### a. Data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari SATPOL PP

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h.4.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), h.28.

<sup>15</sup> Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT Rajawali Grafido Persada, 2006), h. 274

<sup>16</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.57.

yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penegakan Perda Kota Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, serta catatan kuliah yang berkaitan dengan bahasan penelitian sebagai dasar paradigma antara teori yang relevan praktek yang terjadi di lapangan dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan variable dengan judul penelitian.<sup>17</sup>

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis dalam menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai

---

<sup>17</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.19

sebuah penelitian.<sup>18</sup> Dalam hal ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah SATPOL PP Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>19</sup> Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.<sup>20</sup>

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi dua yaitu *probabilitassampling* dan *nonprobabilitassampling*.<sup>21</sup> Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah menggunakan *nonprobabilitas sampling* dengan teknik sampel yang akan dipakai yaitu *Accidental sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan siapa saja yang dijumpai dan terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti dan dapat langsung diwawancarai.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002, h.34

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta : Renika Cipta, 2010). h.173 dan 174.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h.118.

<sup>21</sup> *Ibid.* h.218

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-6*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h.107



#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 metode interview/wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai penunjang.

##### a. Interview/Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas, jelas bahwa metode interview/wawancara merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih dan dilakukan secara lisan.

Didalam Penelitian ini tentunya akan menseleksi yang akan diwawancarai, memang persoalan yang sulit, karena bagi peneliti atau pewawancara yang baru pertama kali berada di dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu, belum mengenal individu atau informan mana yang akan diwawancarai. Namun untuk mengatasi kesulitan tersebut, peneliti atau pewawancara memulai dengan seorang informan pangkal (*key informant*).<sup>24</sup>

##### b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap

---

<sup>23</sup>*Ibid.* h.188

<sup>24</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit* h.83

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.<sup>25</sup>

Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi nonpartisipan, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan.<sup>26</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana implementasi Perda kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh SATPOL PP.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya dapat berupa gambar, patung, film, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dari metode observasi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Cetakan Ke-3, (Bandung : Alfabet, 2013), h.196.

<sup>26</sup> Sutrisno dan Hadi, *Metodologi Reseach jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.151

<sup>27</sup> Sugiono, *Op Cit* h.82.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.<sup>28</sup> Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>29</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena<sup>30</sup>, yaitu

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), h.141.

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), h.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 127



dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari aparaturnya SATPOL PP Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kebijakan Pemerintah dalam Fiqh Siyasah

Kebijakan pemerintah dalam *Fiqh Siyasah* dikenal dengan istilah *Siyasah Dusturiyah*, yang berarti ilmu dalam hukum islam yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>31</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khlaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>32</sup>

Sedang kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 3.

<sup>32</sup> *Ibid.* h.4.

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>33</sup>

Di dalam kurikulum fakultas syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturiyah*, yang dimaksud dengan *dusturiyah*:

“*Dusturiyah* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”<sup>34</sup>

Abu A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan:

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>35</sup>

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.* h.154.

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 52

<sup>35</sup> *Ibid*



nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>37</sup> Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.<sup>38</sup>

*Siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat.

---

<sup>36</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 46-47

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 154

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Op.Cit*, h. 47

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>39</sup>

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.<sup>40</sup>

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".<sup>41</sup>

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah<sup>42</sup> adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 48

<sup>40</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 11

<sup>41</sup> Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1995), h. 119

<sup>42</sup> Piagam Madinah merupakan aturan yang mengatur pola hubungan antara sesama komunitas, baik antara sesama komunitas muslim maupun dengan komunitas non-muslim. Sedangkan salah satu landasannya adalah prinsip bertetangga dengan baik yaitu saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang-orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 2008) h. 15- 16

Undang-undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.<sup>43</sup>

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya.

Namun pasca *khulafa' ar-Rasidun* tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.<sup>44</sup>

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "*Majlis Syura*" atau "*ahl al-hli wa al-aqdi*" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "*Dewan Penasehat*"<sup>45</sup> serta al-Mawardi menyebutnya dengan *ahl al-Ikhtiyar*.<sup>46</sup>

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah Undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 157

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 158

<sup>45</sup> A. Djazuli, *Op. Cit*, h. 76

<sup>46</sup> *Ibid*

sebagai peraturan pelaksana. Menurut teori “*Trias Politica*” bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang-undang (*eksekutif*), kekuasaan pembuat undang-undang (*legislatif*) dan kekuasaan kehakiman (*yudikatif*).<sup>47</sup>

Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri.

Kekuasaan (*sulṭah*) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khlaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>48</sup>

1. Lembaga legislatif (*sulṭah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (*sulṭah tanfiẓiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (*sulṭah Qaḍa'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:<sup>49</sup>

1. *Sulṭah Tanfiẓiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. *Sulṭah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).

<sup>47</sup> A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 233

<sup>48</sup> Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2008), h. 197

<sup>49</sup> A. Hasimi, *Op. Cit*, h. 238



3. *Sulṭah Qadhoiyah* (kekuasaan kehakiman).
4. *Sulṭah Maliyah* (kekuasaan keuangan).
5. *Sulṭah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.<sup>50</sup> Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim.

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-‘ammah*).<sup>51</sup>

Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qaḍa’*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/ *al-Qaḍa’* dalam Islam adalah firman Allah dalam surat Shaad ayat 26:

---

<sup>50</sup> Ibid, h. 250

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1944

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
 شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Juga dalam surat an-Nisa’ ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
 أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Disamping itu, terdapat pula dalam surat al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ  
 عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
 بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan

mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Di dalam hadis Nabi SAW, keberadaan peradilan juga mendapat dukungan. Nabi pernah bersabda:<sup>52</sup>

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : “apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu paha”. (HR. Bukhari Muslim)

Kata hakim dalam hadis di atas mengandung pengertian orang berhak mengadili perkara, dan dalam hadis lain diungkapkan dengan kata qadi yang artinya hakim atau kadi. Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga *al-Qada'* itu hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif umat Islam).<sup>53</sup>

Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Sebab, ia harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di Negara Islam adalah Rasulullah SAW, dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan.<sup>55</sup>

Lembaga peradilan pada masa *khulafa al-Rasyidin* juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru pada zaman *kekhifahan bani Abbasiyah*, dibentuk dewan *Madzalim* Wilayah *al-*

<sup>52</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, alih bahasa H. Salim Bahresy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), h. 638

<sup>53</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, h. 1944

<sup>54</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, 2003 Jakarta h. 47

<sup>55</sup> Abu al-'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995) h. 248

*Mazalim* (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan hisbah (kekuasaan *al-Muhtasib*).<sup>56</sup>

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah *al-Qaḍa'*, Wilayah *al-Mazalim* dan Wilayah *al-Hisbah*.<sup>57</sup> Wilayah *al-Qaḍa'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.

Menurut ulama fikih wewenang lembaga *al-Qaḍa'* adalah terdiri atas:<sup>58</sup>

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an.
2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat.
3. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah.
4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental.
6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.
7. Melaksanakan berbagai wasiat.
8. Bertindak sebagai wali nikah.
9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.
10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar.

Sedangkan Wilayah *al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang *munkar* ketika mulai dikerjakan orang.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 46

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, h.137

<sup>58</sup> *Ibid*, h.3

Sehingga Wilayah *al-Hisbah* adalah suatau kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni Wilayah *al-Qaḍa'* (peradilan biasa) dan Wilayah *al-Mazalim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya).

Wewenang Wilayah *al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan paha dan ridha Allah SWT.

Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para petugas *al-Hisbah* yang disebut *al-Muhtasib*<sup>60</sup> berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut sehari dengan hukuman yang dicontohkan *syara'*.<sup>61</sup>

Tugas-tugas *Hisbah* dibagi menjadi dua bagian yakni menyuruh kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

Dan bagian kedua, melarang dari kemungkaran yang meliputi melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.<sup>62</sup>

Adapun Wilayah *al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak

---

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1939

<sup>60</sup> Al-Muhtasib (petugas Hisbah) adalah pihak pertengahan antara hakim dengan wali pidana, Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 400

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1939

<sup>62</sup> Imam al-Mawardi, *Op. Cit.*, h. 403, 412



rakyat. Wilayah *al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.<sup>63</sup> Dan Muhammad Iqbal mendefinisikan Wilayah *al-Mazalim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/ hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.<sup>64</sup>

Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada *khifah* agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil *khifah* dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadhi al-Mazalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh siyasah oleh Wilayah *al-Mazalim*, sehingga diangkat *Qadhi al-Mazalim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.

Dari situ terlihat bahwa Mahkamah *Mazalim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan *khifah*

<sup>63</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1941

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, h.137

terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut ma'na salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) *khifah*.<sup>65</sup>

Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah *Mazalim*, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya.<sup>66</sup>

Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam Wilayah *al-Mazalim* mempunyai putusan yang final. Mengenai kewenangan hukum antara Wilayah *al-Mazalim* dan Wilayah *al-Hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada Wilayah *al-Mazalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada Wilayah *al-Hisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada Wilayah *al-Mazalim* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi hukuman secara langsung, sedangkan pada Wilayah *al-Hisbah* kewenangan tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus yang ditangani Wilayah *al-Mazalim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani Wilayah *al-Hisbah* hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.<sup>67</sup>

Dalam proses persidangan Wilayah *al-Mazalim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas:

---

<sup>65</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 250

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 242

<sup>67</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, h. 1943

1. para kadi dan perangkat kadi,
2. para ahli hukum (fuqaha),
3. panitera,
4. penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa orang pembantunya,
5. para penguasa dan
6. para saksi.<sup>68</sup>

Kelengkapan perangkat Wilayah *al-Mazalim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.

#### **B. Prinsip-prinsip Fiqh Siyash dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah**

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai ketertiban umum. Oleh karena itu, secara umum, tugas pokok pemerintah atau penguasa suatu negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

---

<sup>68</sup> *Ibid*

Dalam Islam ketertiban umum menjadi tanggung jawab bagi setiap orang yang memeluk Agamanya, sebagaimana tafsiran dari surat Al-Anbiya 107 dinyatakan :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas, Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya Jâmi'ul Bayan fî Ta'wîlil Qur'ân menyebutkan bahwa rahmat dan kasih sayang yang menjadi misi Nabi Muhammad diberikan baik kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada orang-orang kafir. Orang yang beriman menerima rahmat dengan cara diberi petunjuk atau hidayah sehingga mereka bisa menjadi orang yang beriman yang mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, dan akan mendapat kenikmatan yang sebenarnya nanti di akhirat.

Sebagai manusia yang percaya kepada Allah dan menganut ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya Muhammad, kita secara langsung diberi tugas untuk juga menyebarkan kasih sayang, menyebarkan rahmat, menciptakan keamanan dan ketenangan kepada seluruh masyarakat bahkan kepada seluruh dunia.

Kehadiran kita di dunia ini seharusnya tidak menjadikan orang lain resah, gelisah dan takut kepada kita. Kehadiran kita dimanapun, dalam posisi apapun seharusnya menjadikan orang tenang, aman dan tuma'ninah. Ketenangan itu penting dirasakan oleh manusia, sebab manusia yang

mendapatkan keamanan dan ketenangan berpeluang besar untuk dapat mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya yang telah diberikan Allah kepada mereka.

Untuk mengemban amanah tersebut maka diperlukan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Suyuti Pulungan dalam bukunya Beni Ahmad Saebeni, menyebutkan dasar dari Al-Quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *siyasah*, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

#### 1. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri* diantara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

#### 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58:

---

<sup>69</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 124-131



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: ”Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

### 3. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa.

Dalam surat Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

### 4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT, berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Perlunya musyawarah disebabkan sebagai berikut:

- a. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda,
- b. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda,
- c. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
- d. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

### **C. Kebijakan Pemerintah Daerah Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Persoalan kebijakan pemerintahan daerah tidak lepas tentunya dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, adapun penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan apasaja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dijelaskan pada undang-undang tersebut.

#### **1. Definisi Pemerintah Daerah**

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan:

“Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.”

Dan yang dimaksud pemerintah pusat yang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 ayat (1,2,3) sebagai berikut:

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

## 2. Urusan Pemerintahan

Setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam urusan konkuren yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 12

a. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari 2 macam yaitu:

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ;  
dan sosial.

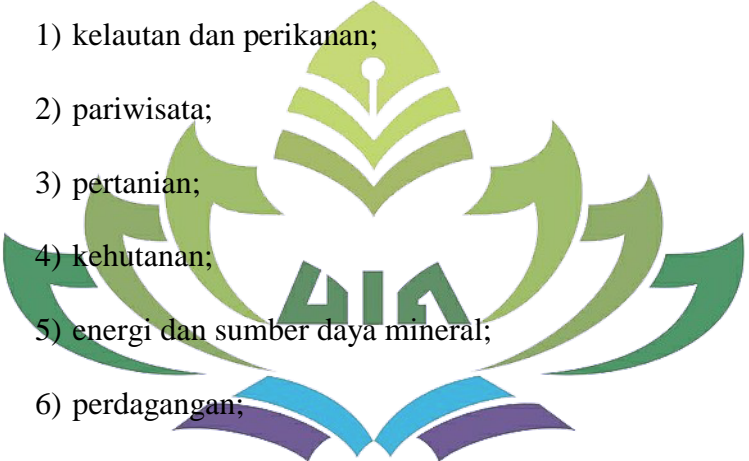
2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;



- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- 
- 1) kelautan dan perikanan;
  - 2) pariwisata;
  - 3) pertanian;
  - 4) kehutanan;
  - 5) energi dan sumber daya mineral;
  - 6) perdagangan;
  - 7) perindustrian; dan
  - 8) transmigrasi.

Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Setiap Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.<sup>71</sup>

### 3. Pembentukan Perda dan Perkada

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Perda memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan Perda dilakukan secara efektif dan efisien.

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat 3

ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi yang disebutkan, Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Dan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Untuk Menegakkan Perda Dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman, Serta Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat Maka

Dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:<sup>72</sup>

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>73</sup>

#### 4. Pelayan Publik

Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:<sup>74</sup>

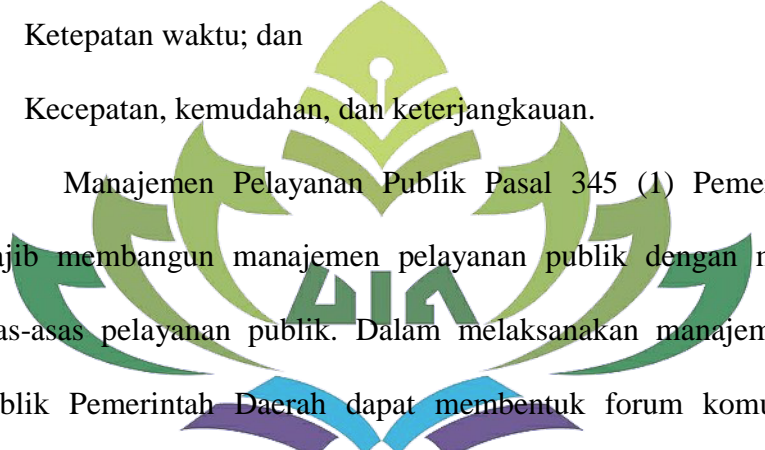
- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 255 ayat 2

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 256 ayat 7

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 344

- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.



Manajemen Pelayanan Publik Pasal 345 (1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik. Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah diwajibkan mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Informasi pelayanan publik dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

**D. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung**

Perda Kota Bandar Lampung ini merupakan salah satu produk hukum pada masanya yang mengatur khusus ketertiban umum, baik pengelolaan kota dan masyarakat.

Adapun kewajiban setiap masyarakat wajib memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, keapikan, kesehatan dan kelestarian lingkungannya.<sup>75</sup> begitu bunyi dari pasal 2 ayat 1 yang mewajibkan masyarakat turut serta dalam menjaga ketertiban umum.

Dan larangan-larangan juga diatur dalam pasal 15-24 Perda Kota Bandar Lampung nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan ketertiban umum. Adapun Larangan pada Pasal 17 yang menjadi pokok bahasan adalah Sebagai berikut:

1. Memarkir kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih di jalan umum lebih dari 6 (enam) jam kecuali pada ruas jalan yang telah ditentukan untuk itu.
2. Mengendarai kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap tebal untuk gas yang bersifat membahayakan di jalan umum yang tingkat pencemarannya melebihi ketentuan, sehingga dapat membahayakan polusi dan gangguan.

---

<sup>75</sup> Indonesia, Perda kota bandar Lampung nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung pasal 2 ayat 1



3. Mengenderai kendaraan bermotor yang alat peredam suara (knalpotnya) mengganggu ketentraman umum sebagai akibat perubahan konstruksi knalpot.
4. Menimbulkan suara-suara yang mengganggu ketentraman umum pada malam hari terutama mulai pukul 24.00 s/d pukul 04.30 Wib.
5. Meninggalkan kendaraan yang bermuatan tinja atau bahan-bahan yang berbau busuk dan bahan-bahan yang mudah terbakar dan atau meledak dijalan umum sehingga dapat mengganggu dan membahayakan orang sekitar jalan tersebut.
6. Mencuci kendaraan yang dipinggir jalan/trotoar dan atau kecuali pada tempat-tempat yang khusus diperuntukan untuk itu.
7. Membuka tambal ban kendaraan bermotor dan sejenisnya di Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dijalan-jalan alteri.
8. Memasang tarub atau menutup jalan/trotoar untuk kepentingan pesta atau upacara lainnya yang bersifat pribadi tanpa seizin walikota.
9. Memasang perintang jalan dijalan umum tanpa seizing walikota.
10. Memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dipandang mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan pemakai jalan.
11. Merusak fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan dan papan nama jalan.
12. Memasang reklame/iklan pada trotoar dan persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas.

13. Memasang pipa air, kabel atau sejenisnya dalam parit gorong-gorong dan jembatan sehingga mengganggu kelancaran air.
14. Merusak lingkungan taman dan hutan kota dengan membakar sampah, membuat api unggun, mencabut/menebang pohon penghijauan.
15. Merusak ornamen kota, lampu-lampu taman dan lampu jalan.

Dalam penindakan pelanggaran Perda tentu terdapat petugas yang berwenang dan penindakan pelanggaran yang harus sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana diatur pada Perda kota bandar Lampung nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung pasal 25:

1. Selain Pejabat Penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2. Dalam melaksanakan tugas, para Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka,
  - d. Melakukan penyitaan benda-benda dan atau surat,

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
  - g. Menghentikan penyidikan,
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
  4. Penyidik membuat berita acara.

Ketentuan pidana bagi pelanggar ketentuan-ketentuan atau tidak mengindahkan larangan-larangan yang diberikan dan atau tidak mentaati kewajiban dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau denda sebanyak—banyaknya Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 26

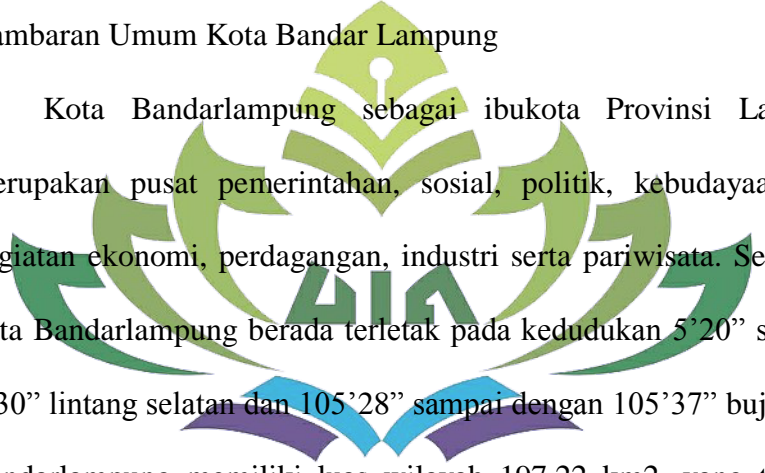
### **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian menjadi hal yang utama dalam mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan data, oleh karena itu peneliti akan menjabarkan lokasi penelitian.

##### **1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung**



Kota Bandarlampung sebagai ibukota Provinsi Lampung yang merupakan pusat pemerintahan, sosial, politik, kebudayaan, dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri serta pariwisata. Secara geografis kota Bandarlampung berada terletak pada kedudukan 5'20" sampai dengan 5'30" lintang selatan dan 105'28" sampai dengan 105'37" bujur timur. Kota Bandarlampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

## 2. Kondisi Topografi dan Demografi

Kota Bandar Lampung sebagian besar terletak di ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- a. Daerah pantai yaitu Telukbetung dan Panjang
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Telukbetung bagian utara
- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjungkarang bagian barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan batu serampok di bagian timur selatan
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan.

Kota Bandar Lampung juga terdapat beberapa aliran sungai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya Way Awi, Way Balau, Way Kuala, Way Simpur dan lain-lain, yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti pertanian dan kegiatan keseharian masyarakat. Dimana panjang sungai-sungai di Bandarlampung umumnya tidak begitu panjang antara 2-14 Km. Selain itu wilayah Bandarlampung merupakan perbukitan diantaranya, Gunung Klutum, Gunung Kunyit, Gunung Kapuk dan lain-lain.

Secara demografis, kota Bandarlampung terdiri dari banyak etnik, sehingga bisa dibilang kota Bandarlampung bersifat heterogen, dengan jumlah penduduk sebesar 979.287 jiwa (BPS 2015), dengan data per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.  
Jumlah Penduduk Kota Bandarlampung, berdasarkan Jenis kelamin

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kedaton	24.495	24.560	49.055
2	Sukarame	28.487	28.434	56.921
3	Tanjung Karang Barat	27.724	26.986	54.710
4	Tanjung Karang Pusat	25.263	25.863	51.126
5	Tanjung Karang Timur	18.520	18.588	37.108
6	Teluk Betung Utara	25.300	25.293	50.593
7	Teluk Betung Barat	15.363	14.436	29.799
8	Teluk Betung Selatan	19.960	19.393	39.353
9	Teluk Betung Timur	21.396	20.249	41.645
10	Bumi Waras	28.949	27.793	56.742
11	Kedamaian	26.584	26.008	52.592
12	Enggal	13.684	14.400	28.084
13	Langkapura	17.129	16.815	33.944
14	Panjang	37.936	36.570	74.506
15	Kemiling	32.683	32.954	65.637
16	Rajabasa	24.472	23.555	48.027
17	Labuhan Ratu	22.606	22.237	44.843
18	Sukabumi	29.348	27.986	57.334
19	Tanjung Senang	22.900	22.875	45.775
20	Way Halim	30.612	30.881	61.493
JUMLAH		493.411	485.876	979.287

(Sumber :BPS tahun 2015)

Berdasarkan pada tabel diatas, bisa dilihat sebaran penduduk Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin, yang terpadat adalah Kecamatan Panjang sebesar 74.506 jiwa, sementara jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Enggal dengan jumlah sebesar 28.084 jiwa, dari jumlah penduduk kota Bandarlampung sebesar 979.287 jiwa, secara keseluruhan.

### 3. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Secara Administratif Bandarlampung terbentuk pada tanggal 17 Juni 1983 sebagai bagian dawi wilayah kota dalam pembentukan keresidenan



propinsi Lampung, yang ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1964. Kota Bandarlampung pada awalnya adalah Kotapraja Tanjung Karang – Teluk Betung yang berstatus sebagai kota kecil.

Kemudian sampai saat ini, tercatat sudah 11 orang putra terbaik Lampung menjadi pemimpin di Kota Bandar Lampung, sebagaimana tabel berikut ini : (Sumber BPS 2013)

Tabel 2 :  
Nama-Nama Walikota Bandar Lampung dari tahun ke tahun

No	Nama	Periode
1.	Sumarsono	1956-1957
2.	H. Zainal Abidin Pagar Alam	1957-1963
3.	Alimudin Umar S.H	1963-1969
4.	Drs. H. M. Thabranie Daud	1969-1976
5.	Drs. H. Fauzi Saleh	1976-1981
6.	Drs. Zulkarnain Subing	1981-1986
7.	Drs. Nurdin Muhayat	1986-1991
8.	Drs. Suharto	1996-2005
9.	Drs. Eddy Sutrisno M.Pd	2005-2010
10.	Drs. H. Herman HN M.M	2010-Sekarang

## B. Gambaran Umum SATPOLPP Kota Bandar Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota<sup>77</sup> Bandar Lampung Nomor 37 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

<sup>77</sup>Katar Peraturan Walikota untuk selanjutnya disingkat Perwali

Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, yang berkedudukan di bawah sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Perwali Kota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016, Adapun tugas utama dari Satpol PP Kota Bandar Lampung sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Perwali Kota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan Sumber Daya Aparatur dan perlindungan masyarakat.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terletak di Basement gedung pelayanan satu atap Kota Bandar Lampung, tepatnya berada di Jalan Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Lampung 35212. Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandar Lampung No.37 Tahun 2016 Pasal 5, terdiri dari;

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Program dan Informasi
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  - c. Seksi Penegakan Hukum

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian
- b. Seksi Kerjasama
- c. Seksi Pengamanan

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

- a. Seksi Pemberdayaan Aparatur
- b. Seksi Pengembangan Aparatur
- c. Seksi Pembinaan Mental dan Kesejahteraan

6. Bidang Perlindungan Masyarakat;

- a. Seksi Perlindungan Masyarakat
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- c. Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan

7. Unit Pelaksana Teknis;

8. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan susunan organisasi Satpol PP Kota Bandar Lampung tersebut, maka tugas dari masing-masing susunan organisasi Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memimpin, mengordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang penegakan Perda, Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengembangan sumber daya aparatur dan Perlindungan Masyarakat

## 2. Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan di bidang kesekretariatan.

### a. Sub Bagian Program dan Informasi

Sub Bagian Program dan Informasi memiliki tugas Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana badan, menghimpun dan menyusun program dan kegiatan badan, menghimpun, menyimpan, serta menyampaikan data informasi badan.

### b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melakukan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, urusan humas, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas.

### c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan aset badan, melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, laporan keuangan, dan aset badan, menyiapkan bahan dalam rangka usulan penetapan bendahara, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah memiliki tugas melaksanakan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan,

pengawasan, penyuluhan, penegakan hukum serta melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil<sup>78</sup>.

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan daerah, membantu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundangan-undangan daerah.

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan memiliki tugas menyampaikan bahan perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah oleh PPNS. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

c. Seksi Penegakan Hukum

Seksi Penegakan Hukum memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan daerah, menyiapkan bahan administrasi dalam rangka penegakan hukum, meliputi penyiapan SPT, surat teguran dan penyegehan, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan dalam penegakan hukum.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas satuan dibidang ketertiban umum dan

---

<sup>78</sup>Kata Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disingkat PPNS

ketentraman masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan.

a. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dalam rangka pelaksanaan kerjasama operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Seksi Pengamanan

Seksi Pengamanan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengamanan objek vital meliputi pengamanan protokoler, rumah dinas, kantor, pimpinan, aset negara dan sarana dan prasana milik pemerintah daerah, membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas satuan dibidang pengembangan sumber daya aparatur, meliputi pemberdayaan, pengembangan, pembinaan mental dan kesejahteraan.



a. Seksi Pemberdayaan Aparatur

Seksi Pemberdayaan Aparatur memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan dan pendayagunaan anggota satuan polisi pamong praja, PPNS dan Linmas. Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dalam rangka pemberdayaan kemampuan anggota Polisi Pamong Praja, PPNS. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Pengembangan Aparatur

Seksi Pengembangan Aparatur memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan sumber daya anggota satuan polisi pamong praja, PPNS, dan Linmas melalui pelatihan dasar dan pelatihan teknis fungsional.

c. Seksi Pembinaan Mental dan Kesejahteraan

Seksi Pembinaan Mental dan Kesejahteraan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan mental dan kesejahteraan anggota satuan polisi pamong praja, PPNS, Linmas. Menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan kode etik dan disiplin anggota satuan polisi pamong praja.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat;

Bidang Perlindungan Masyarakat memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas satuan dibidang perlindungan masyarakat, bina masyarakat meliputi satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta kesiagaan dan penyelamatan.

a. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat dan pengamanan lingkungan. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka bina potensi masyarakat dalam pelanggaran perlindungan masyarakat. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

c. Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan

Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan memiliki tugas menyiapkan teknis dalam rangka bina potensial masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

7. Unit Pelaksana Teknis

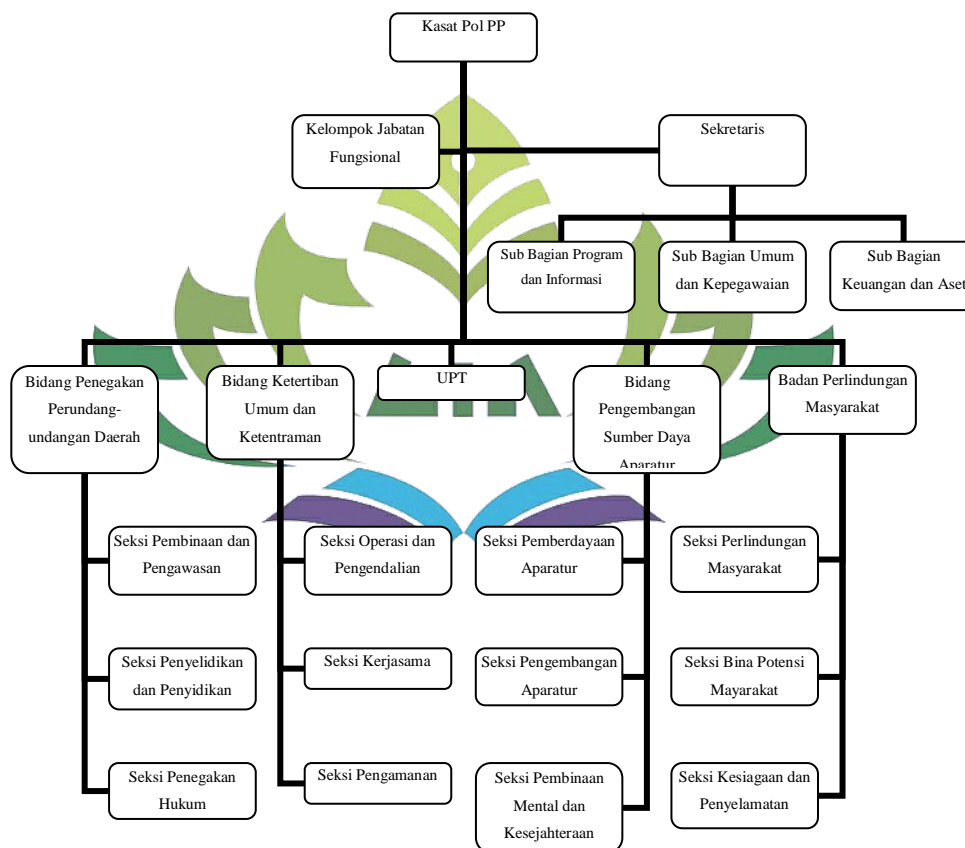
Unit pelaksana teknis ditetapkan dan disetujui oleh kepala satuan polisi pamong praja kota Bandar Lampung untuk melaksanakan dan menegakkan perda.

#### 8. Kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan satuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis satuan sesuai dengan bidang keahliannya.

Adapun bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Gambar I :  
Bagan Struktur (sumber Perwali Nomor 37 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung)



#### C. Kewenangan SATPOL PP Dalam Menyelenggarakan Pasal 17 Perda Nomor 8 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung untuk Meningkatkan Ketertiban Umum

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3

Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP.

“Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini.

Menurut PP ini, Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut PP ini, Satpol PP berwenang:

1. melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- dan

4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

“Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini.

PP ini juga menegaskan, penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.

Selain itu Kewenangan Satpol PP terhadap pasal 17 Perda kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan, diatur juga dalam ketentuan penyidikan Pasal 25 Perda kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan.

“Segala macam bentuk kewenangan Satpol PP memang telah diatur dan diterapkan didalam peraturan perundangan-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya aparat masih menemukan faktor-faktor penghambat penegakan perda ini”<sup>79</sup>

“Sanksi-sanksipun telah diterapkan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan perda ini, namun kami selaku aparat yang juga memiliki fungsi

---

<sup>79</sup>Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 10 November 2017

sebagai pembinaan terhadap masyarakat lebih mengutamakan memberi teguran sebelum dikenakan sanksi pidana”<sup>80</sup>

Kewenangan Satpol PP kota Bandar Lampung Dalam menegakan pasal 17 Perda kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan tentunya menjadi hal utama untuk meningkatkan ketertiban di Kota Bandar Lampung.

**D. Penegakan Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung untuk Meningkatkan Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Satpol PP**

Dari banyaknya penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP pada bulan Februari 2018 sampai Maret 2018, terdapat diantaranya pelanggaran terhadap Perda kota Bandar Lampung nomor 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota bandar lampung, namun diantara pelanggaran yang ditertibkan tidak ada satupun penertiban terkait pelanggaran pasal 17 Perda kota Bandar Lampung nomor 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota Bandar Lampung

Berdasarkan Laporan Kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Monitoring Satpol PP Kota Bandar Lampung bulan Februari 2018 sampai Maret 2018, pelanggaran yang terjadi terkait penertiban Perda Nomor 8 tahun 2000 sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> *Ibid*



Tabel 3:  
Kegiatan dan Penindakan Pelanggaran Perda (Sumber Laporan Kegiatan  
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Kegiatan Pembinaan  
Pengawasan dan Monitoring Satpol PP Kota Bandar Lampung)

No	Lokasi	Hari/Tanggal	Masalah	Keterangan
1	Jl.Imam Bonjol	Kamis, 1 Februari 2018	Pedagang berjualan diatas badan bahu jalan (trotoar)	Diberikan Pembinaan
2	Pasar kangkung	Jum'at, 2 Februari 2018	Pedagang berjualan diatas badan bahu jalan (trotoar)	Diberikan Pembinaan
3	Pasar Panjang	Senin, 5 Februari 2018	Pedagang berjualan diatas badan bahu jalan (trotoar)	Diberikan Pembinaan
4	Pasar Kangkung	Rabu, 7 Februari 2018	Pedagang berjualan diatas badan bahu jalan (trotoar)	Diberikan Pembinaan
5	Jl. Raden Intan	Kamis, 1 Maret 2018	Pedagang berjualan diatas badan bahu jalan (trotoar)	Diberikan Pembinaan
6	Jl. Z.A Pagar Alam	Jum'at, 2 Maret 2018	Pedagang berjualan diatas badan bahu jalan (trotoar)	Diberikan Pembinaan
7	Pasar Gintung	Senin, 26 Maret 2018	Pedagang berjualan diatas badan bahu jalan (trotoar)	Diberikan Pembinaan
8	Pasar Kangkung	Selasa, 27 Maret 2018	Pedagang berjualan diatas badan bahu jalan (trotoar)	Diberikan Pembinaan

Adapun pelanggaran Pasal 17 Perda kota Bandar Lampung nomor 8 Tahun 2000 berdasarkan hasil *observasi* masih banyak terjadi di lingkungan kota Bandar Lampung seperti<sup>81</sup> :

1. Parkir liar di Daerah jalan pemuda tanjung karang pusat (depan Chandra Dept. Store), Pelanggaran Pasal 17 ayat 1.
2. Kendaraan Truk yang melintas di Jalan umum dan mengeluarkan asap hitam tebal, Pelanggaran Pasal 17 ayat 2.
3. Kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot berisik, Pelanggaran Pasal 17 ayat 3.
4. Memasang perintang jalan dan tarub yang mengganggu lalu lintas saat masyarakat melakukan Kegiatan keramaian tanpa seizin walikota, Pelanggaran Pasal 17 ayat 8-9.
5. Banyaknya spanduk, dan reklame/papan iklan di kota bandar Lampung yang terkesan pemasangannya sembarang, Pelanggaran Pasal 17 ayat 10 dan 12.
6. Masih banyak terlihat di Kota Bandar Lampung Fasilitas jalan yang terlihat rusak dikarenakan ulah manusia, Pelanggaran Pasal 17 ayat 11.

Dari sebagian pelanggaran Pasal 17 yang masih terjadi saat ini, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP pada bulan Februari sampai Maret untuk menertibkan permasalahan Pelanggaran Pasal 17, yang mengakibatkan masih banyak terjadinya pelanggaran pada pasal ini.

---

<sup>81</sup>Sumber: Hasil Observasi periode bulan Januari 2018 sampai Maret 2018

Akan tetapi hasil observasi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung pada 16 November 2017, peneliti menemukan 2 fakta adanya kegiatan penegakan Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung nomor 8 Tahun 2000<sup>82</sup>:

1. Adanya masyarakat yang di proses di kantor Satpol PP karena terjaring razia malam yang dilaksanakan oleh Satpol PP di Jalan Raden Intan. Pelaksanaan Penertiban Pasal 17 ayat 4.
2. Ada beberapa bekas banner atau spanduk iklan yang kedapatan mengganggu ketertiban umum, atau melintang di jalan. Pelaksanaan penertiban pasal 17 ayat 10 dan 12.



---

<sup>82</sup>Sumber: Hasil Observasi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung pada 16 November 2017

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Implementasi Pasal 17 Perda Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung**

Pasal 17 perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan suatu kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mendukung ketertiban kota melalui larangan-larangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung, maka dari itu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kebijakan ini dapat melakukan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dalam proses penertibannya yang dilaksanakan oleh Satpol PP kota bandar Lampung.

Seperti yang diketahui bahwa pasal 17 ini melarang setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung yang dapat mengganggu ketertiban umum, jalan umum dan merusak fasilitas umum.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang terealisasi dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung Termasuk dalam urusan wajib pemerintahan termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan telah diatur dalam pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Satpol PP mempunyai kewenangan, Penertiban, Penindakan, Penyelidikan, dan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran Perda yang terjadi.

Menurut hasil wawancara dan penelitian di kantor wilayah Satpol PP, “Segala macam bentuk kewenangan Satpol PP telah diterapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya aparat masih menemukan faktor-faktor penghambat” kata bapak Mansi S.H (Sekretaris Satpol PP) saat diwawancarai.

“Sanksipun telah diterapkan kepada masyarakat yang melanggar, namun kami selaku aparat yang juga memiliki fungsi sebagai pembinaan terhadap masyarakat lebih mengutamakan memberi teguran sebelum dikenakan sanksi terhadap pelanggar” berikut keterangan tambahan dari sekretaris Satpol PP kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil Laporan kegiatan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Monitoring Satpol PP Kota Bandar Lampung bulan Februari sampai Maret 2018, menunjukan tidak adanya kegiatan penertiban terhadap pelanggaran Pasal 17, dan dari hasil Observasi November 2017 terdapat beberapa hasil kegiatan dari pelaksanaan penertiban pasal 17. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP ada yang bersifat resmi, dan ada yang bersifat *insidental*.

Dalam Hal ini Implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan,

Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Satpol PP, tidak maksimal dilaksanakan. Sehingga menyebabkan masih banyak terjadi Pelanggaran terhadap pasal 17 ini.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Perda Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung**

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al Quran menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Mengutip dari Muhammad Asad, Al Quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang didunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur umat islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, namun pasc *khulafa'ar-Rasidun* tepatnya pada abad ke-19, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi.

Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, dan urusan kekuasaan yng menjalankan undang-undang menurut Abdul Wahab Khlaf adalah *Sulṭah Tanfiẓiyyah*, dan pada posisi inilah kedudukan Satpol PP, sebagai mana tugas dan fungsi nya menjalankan Perda.

Mengutip dari Abdul Kadir Audah, Kekuasaan dalam Negara islam terbagi menjadi lima yaitu:



1. *Sulṭah Tanfiẓiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. *Sulṭah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. *Sulṭah Qadhoiyah* (kekuasaan kehakiman).
4. *Sulṭah Maliyah* (kekuasaan keuangan).
5. *Sulṭah Muraqabah wa Taqwim*, (Kekuasaan pengawasan masyarakat)

Dari ke lima kekuasaan tersebut , sebagaimana tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjalankan pengakan Perda satpol PP memiliki tiga wewenang yaitu, *Sulṭah Tanfiẓiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang), *Sulṭah Qadhoiyah* (kekuasaan kehakiman) karena Satpol PP dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan *Sulṭah Muraqabah wa Taqwim*, (Kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai implementasi Satpol PP terhadap *Sulṭah Qadhoiyah*, *Sulṭah Tanfiẓiyyah*, *Sulṭah Muraqabah wa Taqwim* menjadi tanggung jawab setiap jajaran aparatur Satpol PP, dari Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis sampai kelompok Jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Perwali Kota Bandar Lampung Nomor 37 tahun 2016 pasal 5.

Penulis berpendapat bahwa Satpol PP kota Bandar Lampung belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai *Sulṭah Qadhoiyah*, *Sulṭah Tanfiẓiyyah*, *Sulṭah Muraqabah wa Taqwim* karena masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap perda.

Dalam Islam ketertiban umum menjadi tanggung jawab bagi setiap orang yang memeluk Agamanya, sebagaimana tafsiran dari surat Al-Anbiya 107 dinyatakan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas, Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya Jâmi'ul Bayan fî Ta'wîlil Qur'ân menyebutkan bahwa rahmat dan kasih sayang yang menjadi misi Nabi Muhammad diberikan baik kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada orang-orang kafir. Orang yang beriman menerima rahmat dengan cara diberi petunjuk atau hidayah sehingga mereka bisa menjadi orang yang beriman yang mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, dan akan mendapat kenikmatan yang sebenarnya nanti di akhirat.

Kehadiran Satpol PP sebagaimana untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan ketertiban umum. Mengemban amanah tersebut maka implementasi kinerja Satpol PP kota Bandar Lampung ditinjau dengan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah menurut hukum islam, Suyuti Pulungan dalam bukunya Beni Ahmad Saebeni, menyebutkan Empat dasar dari Al-Quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *siyashah*, yaitu;

## 1. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri* diantara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

Dalam prakteknya Satpol PP telah menerapkan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul-Nya, dan ketaatan terhadap *ulil amri*, sebagaimana dibuktikan dengan terus dilaksanakannya penegakan-penegakan perda sesuai dengan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan walaupun tidak menindak pelanggaran Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

## 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Tidak hanya terhadap undang-undang Allah, undang-undang yang dibuat oleh pemimpin pun ditegakkan secara adil tidak pandang bulu, semua dilaksanakan oleh Satpol PP kota Bandar Lampung semerta-merta demi mewujudkan ketertiban umum kota Bandar Lampung, setiap yang ketahuan melanggar perda di tindak dan diberikan Pembinaan oleh Satpol PP.

### 3. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam surat Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

### 4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT, berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Perlunya musyawarah disebabkan sebagai berikut:

- a. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda,
- b. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda,
- c. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
- d. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

Karena prinsip-prinsip itu segala bentuk implementasi Perda Nomor 8 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Satpol PP sudah dilaksanakan, walaupun pada pelanggaran Perda pasal 17 tidak sepenuhnya dilakakukan penindakan oleh Satpol PP, kemungkinan besar dikarenakan oleh faktor-faktor yang menghambat terjadinya penindakan terhadap pelanggaran Pasal 17 tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam Implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ini berisikan tentang Larangan mengenai kegiatan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, dalam implementasi Pasal 17 aparat Satpol PP kurang maksimal dalam melaksanakan penindakan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur pada Perwali nomor 37 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung, sehingga menyebabkan masih adanya pelanggaran terkait pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 tahun 2000 ini. Dari hasil penelitian inilah maka terdapat dua Faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya pelaksanaan pasal 17 Perda kota Bandar Lampung nomor 8 Tahun 2000:
  - a. Kurangnya kesadaran aparat Satpol PP untuk melihat setiap pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Bandar Lampung.



- b. Kurangnya tingkat kesadaran Masyarakat Akan Peraturan yang menegakan ketertiban Umum, di Karenakan masyarakat yang merasakan dan dapat melaporkan setiap pelanggaran Perda yang terjadi, Khusus nya Pasal 17 Perda kota Bandar Lampung nomor 8 Tahun 2000.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi pasal 17 Perda Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang diketahui dari hasil penelitian :
  - a. Satpol PP dalam menjalankan pengakan Perda memiliki tiga wewenang yaitu, *Sulṭah Tanfiẓiyyah*(kekuasaan penyelenggara undang-undang), *Sulṭah Qadhoiyah* (kekuasaan kehakiman) karena Satpol PP dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan *Sulṭah Muraqabah wa Taqwim*, (Kekuasaan pengawasan masyarakat). Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa Satpol PP belmum maksimal dalam menjalankan wewenang sbeagai *Sulṭah Tanfiẓiyyah*(kekuasaan penyelenggara undang-undang)
  - b. Ajaran agama Islam mengajarkan kebaikan demi ketertiban umum, ini dibuktikan dalam Al-quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang dijelaskan oleh pendapat Ibnu Abbas, Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya *Jâmi'ul Bayan fî Ta'wîlil Qur'ân* menyebutkan bahwa rahmat dan kasih sayang yang menjadi misi Nabi Muhammad diberikan baik kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada orang-orang kafir. Dikarenakan itulah

maka Larangan-larangan terhadap pelanggaran Ketertiban umum harus ditegakan demi tercapainya ketertiban umum dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut diatas, kiranya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Satpol PP Kota Bandar Lampung yang memiliki wewenang terhadap Penegakan Perda lebih memperbanyak personil dibidang penegakan ketertiban umum, dan pembinaan masyarakat. Agar lebih efektif dalam melaksanakan Perda, Ada personil yang mengeksekusi pelanggaran dan ada yang membina masyarakat untuk tidak melakukan dan mengulangi pelanggaran terhadap aturan Ketertiban umum.
2. Untuk masyarakat sebaiknya turut serta dalam meningkatkan ketertiban umum, sebab masyarakatlah yang merasakan dan mengetahui bagaimana baiknya ketika ketertiban umum berjalan sebagaimana Perda yang telah diatur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1995
- Abu al-'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995
- Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2008
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers 2012
- Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, Jakarta: Qisthi Press, 2015

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Alumni, 1986

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riseach Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, alih bahasa H. Salim Bahresy, Surabaya: Bina Ilmu, 2016

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 2008

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Manjar Maju, 2002

Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Methods) Cetakan Ke-3*, Bandung : Alfabet, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Renika Cipta, 2010

Sutrisno dan Hadi, *Metodologi Reseach jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, 2003  
Jakarta

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994

### **Undang-undang :**

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung

Indonesia, Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

